

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL: PEDAGANG KAKI LIMA DI TEPI LAUT TANJUNG PINANG

**Arib Darlicza¹, Dedi Efendi², Desti Mirawati³, Raharani Putri⁴, Silvia Fitriani⁵,
Triana Kurnia Sari⁶, Afriyadi⁷**

STIE Pembangunan Tanjungpinang

e-mail: aribdarlicza@gmail.com¹, dedibonot@gmail.com², destidestimirawati@gmail.com³,
raharani.putri@gmail.com⁴, sfitriane@gmail.com⁵, trianakurniasari05@gmail.com⁶,
afriyadiardi@gmail.com⁷

Abstrak – Peningkatan perekonomian perkotaan salah satunya didukung dengan adanya pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti terganggunya keindahan kota, kebersihan, keamanan, kesemrawutan kota, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Hal ini yang mendasari perlunya sebuah penataan dan pemberdayaan akan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penataan dan pemberdayaan Sektor Informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan teknik literature review dari beberapa studi kasus. Studi kasus yang dipilih berada di Alunalun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Buah Serumpun Kilometer 4. Berdasarkan hasil kajian di beberapa wilayah studi terdapat perbedaan penanganan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan relokasi serta penertiban. Untuk pemberdayaan dilakukan dengan sosialisasi, promosi dan informasi, pembentukan paguyuban, bantuan berupa pemberian modal dan pemenuhan sarana prasarana, serta kerja sama dengan investor.
Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pemberdayaan.

Abstract – One of the ways to improve the urban economy is the presence of street vendors (PKL). The existence of street vendors (PKL) also raises several problems such as disruption of the beauty of the city, cleanliness, security, city chaos, security, and traffic jams. This underlies the need for an arrangement and empowerment of the existence of street vendors (PKL). The purpose of this research is to organize and empower the Informal Sector, especially street vendors (PKL). The research method used is descriptive qualitative and literature review technique approach from several case studies. The selected case studies were in Tulungagung Regency Square, Tanah Abang Market, and Buah Serumpun Kilometer 4 Market. Based on the results of the study in several study areas, there were differences in the management and empowerment of street vendors (PKL). The arrangement of street vendors (PKL) is carried out by relocating and controlling. Empowerment is carried out through socialization, promotion and information, formation of associations, assistance in the form of providing capital and fulfilling infrastructure facilities, and cooperation with investors.

Keywords: Street Vendors, Structuring, Empowerment.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi perkotaan di Indonesia tercermin dalam beragamnya aktivitas ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Sektor formal adalah kegiatan yang tunduk pada regulasi resmi, sementara sektor informal beroperasi tanpa pengawasan institusi. Sektor informal, meskipun ilegal, semakin berkembang di perkotaan. Ini menjadi opsi bagi penduduk desa yang berpindah ke kota dengan modal dan keterampilan terbatas. Banyak pekerja perkotaan yang pindah dari sektor formal ke sektor informal, karena modal yang dibutuhkan sedikit dan tidak memerlukan keterampilan khusus.

Sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima seringkali mengganggu tata kota, menciptakan kesan kumuh, dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas serta gangguan bagi pejalan kaki. Hal ini karena kurangnya perhatian terhadap estetika, penggunaan lahan yang benar, tata kota, kebersihan, dan keamanan (Suwandi, 2012).

Keberadaan pedagang kaki lima juga dapat meningkatkan masalah seperti pencopetan, yang mengancam keamanan warga di sekitar mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk mengurangi dampak negatif.

Penataan bisa dilakukan melalui kebijakan pemerintah kota yang mengatur lokasi dan regulasi pedagang kaki lima. Sementara pemberdayaan melibatkan program pelatihan, bantuan modal, dan peningkatan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan usaha pedagang kaki lima.

Melalui upaya penataan dan pemberdayaan ini, diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kontribusi ekonomi sektor informal dan menjaga tampilan estetika serta keamanan perkotaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengenai Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik wawancara yang diperoleh dari pedagang kaki lima di Tepi Laut dan studi literatur sebagai referensi untuk melengkapi penelitian ini. Wawancara adalah metode komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pendapat, atau pandangan dari narasumber tentang suatu topik atau subjek tertentu. Menurut Paul Lazarsfeld, wawancara adalah proses pengumpulan informasi yang sistematis dan berlangsung berulang kali, di mana seorang peneliti menghadapi pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan mencatat jawaban mereka. Penelitian ini akan membahas beberapa contoh tentang bagaimana Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima yang berada di Tepi Laut Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan bentuk strategi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengalokasi/menyesuaikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk lebih mampu merencanakan, membangun dan memelihara hasil kegiatan secara mandiri.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi lokal tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Begitu pula keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berada disepertaran tepi laut Kota Tanjungpinang. Tepi laut sebagai tempat hiburan rakyat yang murah meriah menjadikannya salah satu tempat yang strategis untuk berjualan.

Pemberdayaan adalah suatu proses menyeluruh dan aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu dibedayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan yang dimaksud bisa bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bekal dalam berwirausaha seperti strategi berjualan dan yang lebih penting adalah menumbuhkan jiwa enterpreneurship bagi para PKL ini. Selain pelatihan juga diperlukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan agar para pedagang kaki lima ini mempunyai kesadaran untuk terus berkreasi agar dagangan mereka dilirik oleh pembeli seperti packaging produk atau barang dan juga penataan tempat berjualan dengan memperhatikan aspek estetika.

Faktor non teknis yang dapat diperoleh pedagang PKL dalam hal ini adalah identitas, pengakuan serta kejelasan status mata pencaharian juga menentukan dalam pemberdayaan PKL. Penataan para PKL sesuai dengan lajur jenis dagangannya, melakukan koordinasi

intensif juga merupakan kekuatan strategis dalam berpartisipasi perumusan kebijakan terkait dengan kepentingan usahanya. Bagi pemerintah daerah, penataan pedagang kaki lima ini merupakan keharusan untuk bisa menyesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayah yang telah ditetapkan. Bagi pedagang, adanya lokasi yang disediakan sebagai kompensasi penggusuran adalah ketenangan dan kenyamanan dalam berdagang sehingga para pedagang tidak takut lagi akan digusur. Sedangkan bagi masyarakat, penataan ini membuat kenyamanan dalam beraktivitas di tempat umum dan ketertiban terjamin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan –temuan di lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di tepi laut kota Tanjungpinang merupakan salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi semua pihak. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan dan pelatihan para PKL, penyediaan sarana dan prasarana, pembentukan paguyuban dan koperasi juga penguatan kapasitas kelembagaannya termasuk kemudahan dalam mendapatkan modal bergulir.
2. Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian pedagang kaki lima dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastiar, Y., Muhammad Danial, R. D., & Suwiryono, D. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2013). *Jurnal Governansi*, 8(2), 79–90.
- Putra, S. A., & Iswandi, I. (2023). PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 280-292.
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1).
- Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 31.